



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 360 TAHUN 2026

TENTANG
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Reformasi Birokrasi merupakan upaya mendasar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, pembangunan manusia, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, adaptif, transparan, dan akuntabel dalam menghadapi perkembangan teknologi dan dinamika kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2026 serta memastikan keterpaduan pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi dengan prioritas pembangunan daerah dan kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional, perlu disusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lainnya Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 180);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2026 tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026.

KESATU : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam implementasi reformasi birokrasi di Kabupaten Bantul baik general maupun tematik.

- KETIGA : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai ruang lingkup:
1. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General; dan
 2. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik.
- KEEMPAT : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap triwulan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 September 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 360 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA AKSI REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

I. Reformasi Birokrasi General

RB General berfokus pada perbaikan sistem dan tata kelola internal pada instansi pemerintah. Pelaksanaan RB General diharapkan agar fokus dan percepatan sasaran strategis RB dapat tercapai secara keseluruhan. RB General berfokus pada pelaksanaan kegiatan utama yang menjadi mandatory, kegiatan utama tersebut antara lain:

Tabel 1. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General

Kegiatan Utama	Indikator	Target 2026	Rencana Aksi	Satuan Output	Indikator Output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total	Anggaran	Koordinator	Pelaksana
Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	5	Melaksanakan evaluasi pelaksanaan sistem kerja pada Pemerintah Kabupaten Bantul	Dokumen	Jumlah Dokumen evaluasi pelaksanaan sistem kerja				1	1	1.000.000	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
			Menyusun evaluasi kelembagaan berdasarkan kinerja Instansi dan beban kerja	dokumen	Jumlah Dokumen evaluasi kelembagaan				1	1	57.211.000	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	4.17	Melaksanakan Clearance Belanja SPBE	Dokumen	Jumlah Dokumen Berita Acara Rekomendasi Rencana dan Anggaran SPBE	10	10			20	12.750.000	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo
			Menyusun Laporan Pelaksanaan SPBE/Pemerintah Digital	Dokumen	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan SPBE/Pemerintah Digital				1	1	89.700.000	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo
			Melaksanakan Pengukuran Kematangan Keamanan Siber dan Sandi	Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengukuran Kematangan Keamanan Siber dan Sandi		1			1	40.000.000	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo
			Melaksanakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi sesuai Siklus Pengembangan Aplikasi	Aplikasi	Jumlah Aplikasi yang Dibangun/Dikembangkan sesuai dengan Siklus Pembangunan Aplikasi	48	48	48	48	48	631.260.000	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo
			Mengelola Portal Layanan	Layanan	Jumlah Layanan Terkelola pada Portal	73	73	73	73	73	528.770.000	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo

Kegiatan Utama	Indikator	Target 2026	Rencana Aksi	Satuan Output	Indikator Output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total	Anggaran	Koordinator	Pelaksana
			Terintegrasi		Layanan Terintegrasi								
	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	3	Mengoptimalkan pengisian seluruh domain Arsitektur SPBE kondisi saat ini (As-Is) di aplikasi SIAP Digital.	Dokumen	Jumlah Dokumen Berita Acara Rekomendasi Rencana dan Anggaran SPBE		6			6	10.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh Perangkat Daerah
			Mengoptimalkan pengisian seluruh domain Arsitektur SPBE target/rencana ke depan (To-Be) di aplikasi SIAP Digital.	Domain Arsitektur	Jumlah Domain Arsitektur SPBE yang terisikan pada Aplikasi SIAP Digital (To-Be)		6			6	10.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh Perangkat Daerah
			Mengoptimalkan keterisian Peta Rencana pada aplikasi SIAP Digital	Laporan	Jumlah Laporan Indikator Kinerja Utama Bupati yang terisikan pada aplikasi SIAP SPBE		23			23	10.000.000	Dinas komunikasi dan Informasi	Dinas komunikasi dan Informasi
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	Nilai SAKIP	84	Melakukan pendampingan terhadap proses perencanaan di Perangkat Daerah	Kali Pendampingan	Jumlah PD yang didampingi dalam penyusunan dokumen perencanaan		1	1		2	10.000.000	Bappeda	Bappeda
			Melakukan pendampingan terhadap proses perencanaan di Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan setiap PD	Mendesain kebutuhan anggaran belanja dalam dokumen perencanaan tahunan agar sesuai dengan Visi-Misi dan Program Unggulan daerah.		1		1	2	10.000.000	Seluruh PD	Bappeda

Kegiatan Utama	Indikator	Target 2026	Rencana Aksi	Satuan Output	Indikator Output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total	Anggaran	Koordinator	Pelaksana
			Melakukan verifikasi terhadap dokumen IKU yang diupload dalam esr.	Kali	Jumlah PD yang telah upload dokumen IKU sesuai ketentuan	1				1	750.000	Bappeda	Bappeda
			Mengkoordinasikan penyusunan PK agar sesuai dengan template terbaru yang telah menginternalisasi pemanfaatan Pohon Kinerja dan cascading	Dokumen PK	Jumlah PD yang didampingi dalam penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja	1			1	2	3.000.000	Seluruh PD	Bagian Organisasi
			Menyusun template PK yang dapat memberikan penjelasan capaian tahun n-1 dibandingkan dengan kondisi ideal, permasalahan, atau isu strategis yang dihadapi.	Dokumen	Jumlah PD yang telah menggunakan template PK dan IKU terbaru.	1				1	500.000	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
			Melakukan pendampingan terhadap penyusunan PK dengan template terbaru yang harus menjelaskan <i>benchmarking</i> capaian target dengan kondisi ideal, permasalahan, atau isu strategis yang dihadapi.	jumlah PD	Jumlah PD yang didampingi dalam penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja	45		45		90	4.000.000	Semua OPD	Bagian Organisasi

Kegiatan Utama	Indikator	Target 2026	Rencana Aksi	Satuan Output	Indikator Output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total	Anggaran	Koordinator	Pelaksana
			Mengoordinasikan peninjauan kembali dan melakukan kurasi/verifikasi terhadap usulan perubahan indikator output subkegiatan yang diajukan oleh seluruh PD pada aplikasi e-SAKIP. Melaksanakan Bimtek e-SAKIP dalam rangka menambahkan indikator aktivitas dalam aplikasi e-SAKIP	Jumlah PD	Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang indikator outputnya selesai dikurasi dan diverifikasi sesuai standar kualitas.	45				45	500.000	Semua OPD	Bappeda
			Melaksanakan Desk Capaian Kinerja berkala (Triwulanan) untuk memonitor konsistensi dan kualitas kualitas output serta kendala yang dihadapi PD.	Dokumen	Berita acara desk Capaian Kinerja Triwulan Tahun 2026.	1	1	1	1	4	8.000.000	Bappeda	Bappeda
			Melaksanakan desk pendampingan penyusunan kinerja untuk memastikan laporan kinerja yang tursusun dapat menguraikan struktur yang sistematis, data yang valid, serta narasi yang mampu menjelaskan mengapa suatu target tercapai atau tidak tercapai.	Jumlah PD	Jumlah PD yang didampingi dalam penyusunan laporan kinerja				1	1	4.000.000	Semua PD	Bagor

Kegiatan Utama	Indikator	Target 2026	Rencana Aksi	Satuan Output	Indikator Output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total	Anggaran	Koordinator	Pelaksana
			Selain juga pengukuran kinerja harus benar dan sesuai.										
			Tersusunnya Surat Pernyataan Inspektur bahwa temuan dan rekomendasi yang akan diberikan saat evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar menggambarkan hal yang menjadi kekurangan dan memberikan solusi yang efektif	Surat edaran	Surat Pernyataan Inspektur yang berisi Memastikan bahwa temuan dan rekomendasi yang diberikan saat evaluasi akuntabilitas kinerja internal menggambarkan hal yang menjadi kekurangan dan memberikan solusi yang efektif		1			1		Inspektorat	Inspektorat
			Melaksanakan evaluasi SAKIP Perangkat daerah	Jumlah OPD	Jumlah OPD yang di lakukan evluasi AKIP			45		45	4.000.000	Inspektorat	Inspektorat
			Pengembangan fitur e-sakip	Jumlah fitur	Jumlah penambahan fitur baru			3		3	30.000.000	Dinas Kominfo	Bagian Organisasi, Inspektorat dan Bappeda
Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	0.75	Pendampingan Implementasi Zona Integritas	Kegiatan	Koordinasi dan pendampingan		1			1	1.000.000	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
			Seleksi dan pengajuan evaluasi Zona Integritas ke TPN	OPD/Unit kerja	Terpilihnya Perangkat daerah yang akan mengikuti evaluasi ZI		0	3		3	1.000.000	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi

Kegiatan Utama	Indikator	Target 2026	Rencana Aksi	Satuan Output	Indikator Output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total	Anggaran	Koordinator	Pelaksana
			Melaksanakan survei mandiri Persepsi Anti Korupsi dan survei Mandiri persepsi pelayanan publik pada responden penggunaan layanan perangkat daerah	Laporan	Jumlah laporan perangkat daerah yang dilakukan survei mandiri		3			3	500.000	Inspektorat	Inspektorat
			Melaksanakan monitoring dan evaluasi perangkat daerah yang telah mendapatkan predikat WBK dan WBBM	Laporan	Jumlah laporan		3			3	500.000	Inspektorat	Inspektorat
			Melaksanakan pendampingan penilaian Zona integritas menuju WBK/WBBM pada perangkat daerah	Laporan	Jumlah laporan		3			3	500.000	Inspektorat	Inspektorat
			Melaksanakan evaluasi laporan ZI Perangkat daerah yang diajukan penilaian ZI	Laporan	Jumlah laporan		3			3	500.000	Inspektorat	Inspektorat
			Melaksanakan sosialisasi dan pembekalan perangkat daerah yang lolos Desk evaluasi/ wawancara dan observasi lapangan	Laporan	Jumlah laporan		0	3		3	500.000	Inspektorat	Inspektorat

Kegiatan Utama	Indikator	Target 2026	Rencana Aksi	Satuan Output	Indikator Output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total	Anggaran	Koordinator	Pelaksana
Penguatan Implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	4	Melaksanakan penilaian mandiri SPIP pada perangkat daerah diajukan penilaian SPIP	Laporan	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan penilaian mandiri SPIP			45		45	1.000.000	Inspektorat	Inspektorat
			Pelaksanaan Penjaminan Kualitas SPIP pada perangkat daerah yang diajukan penilaian SPIP	Laporan	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan penjaminan kualitas SPIP			45		45	1.000.000	Inspektorat	Inspektorat
			Pendampingan Manajemen risiko tingkat Perangkat Daerah	Laporan	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan manajemen resiko	45				45	1.000.000	Inspektorat	Inspektorat
			Pelaksanaan evaluasi manajemen resiko tingkat perangkat daerah	Laporan	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan evaluasi manajemen risiko	45				45	1.000.000	Inspektorat	Inspektorat
			Pelaksanaan evaluasi penyusunan Unit Pengelola Risiko tingkat Perangkat Daerah	Laporan	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan evaluasi dalam penyusunan UPR		45			45	1.000.000	Inspektorat	Inspektorat
			Pendampingan manajemen risiko Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	Laporan	Laporan pendampingan manajemen risiko Pemda Bantul			1		1	1.000.000	Inspektorat	Inspektorat
			Pelaksanaan evaluasi manajemen risiko Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	Laporan	Laporan evaluasi manajemen risiko Pemda Bantul			1		1	1.000.000	Inspektorat	Inspektorat

Kegiatan Utama	Indikator	Target 2026	Rencana Aksi	Satuan Output	Indikator Output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total	Anggaran	Koordinator	Pelaksana
			Pendampingan penyusunan risiko <i>fraud</i> tingkat perangkat daerah	Laporan	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan penyusunan risiko <i>fraud</i>			6		6	1.000.000	Inspektorat	Inspektorat
			Pelaksanaan evaluasi risiko <i>fraud</i> tingkat perangkat daerah	Laporan	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan evaluasi penyusunan resiko <i>fraud</i>			6		6	1.000.000	Inspektorat	Inspektorat
			Pendampingan penyusunan Unit Pengelola Risiko tingkat perangkat daerah	Dokumen	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dalam penyusunan UPR	45				45	1.000.000	Inspektorat	Inspektorat
Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	4	Melaksanakan forum admin lapor Perangkat Daerah	kegiatan	Jumlah kegiatan forum admin lapor Perangkat Daerah		1			1	4.350.000	Dinas komunikasi dan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informasi
			Melakukan monitoring aduan masuk	persen	Persentase aduan yang tertangani	100	100	100	100	100	48.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Semua Perangkat Daerah
			Melakukan publikasi melalui media	kegiatan	Jumlah publikasi layanan aduan melalui media	0	1	1	1	3	2.800.000	Dinas Komunikasi dan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informasi
Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	78	Sosialisasi SPI Tahun 2026	kegiatan	jumlah perangkat daerah yang ikut sosialisasi	1				1	1.500.000	Inspektorat	Semua Perangkat Daerah kecuali RSUD dan Inspektorat
			Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SPI pada perangkat	Laporan	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi		1			1	1.000.000	Inspektorat	Semua Perangkat Daerah kecuali

Kegiatan Utama	Indikator	Target 2026	Rencana Aksi	Satuan Output	Indikator Output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total	Anggaran	Koordinator	Pelaksana
			daerah										RSUD dan Inspektorat
			Perumusan dan penyusunan RTL SPI Tahun 2025	Laporan	Jumlah laporan RTL SPI			1		1	1.000.000	Inspektorat	Inspektorat, BPKPAD, BKPSDM, Diskominfo, Bagian Hukum
			Melaksanakan Upaya-upaya pencegahan korupsi melalui 8 area pencegahan	Persen	Dokumen Bukti dukung 8 area pencegahan korupsi		1	1	1	3	20.250.000	Inspektorat	Semua Perangkat Daerah
Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	81	Pendampingan Pengukuran Indek Kualitas Kebijakan	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang didampingi dalam Pengukuran Indek Kualitas Kebijakan			3		3	5.000.000	Bagian Organisasi	Analisis Kebijakan dan PD Terkait
			<i>Self Assesment</i> Pengukuran IKK	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah melaksanakan <i>Self Assesment</i>			3		3	3.000.000	Bagian Organisasi	Analisis Kebijakan dan PD Terkait
			Pembentukan Tim Kelompok kerja penilaian IKK	Dokumen	Surat Keputusan Bupati	1				1	500.000	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	98.72	<i>Self Assesment</i> Pengukuran IRH	kegiatan	jumlah pelaksanaan <i>self assesment</i>			1		1	6.000.000	Bagian Hukum	Bagian Hukum
			Mengoptimalkan proses harmonisasi produk hukum dan menyusun analisis dan evaluasi perda	Dokumen	Jumlah dokumen harmonisasi, analisa, dan evaluasi	1	1	1	1	4	5.000.000	Bagian Hukum	Bagian Hukum
			Sosialisasi dari Kemenkum	Kegiatan	Jumlah sosialisasi terkait Reformasi Hukum	1				1		Kanwil Hukum	Bagian Hukum

Kegiatan Utama	Indikator	Target 2026	Rencana Aksi	Satuan Output	Indikator Output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total	Anggaran	Koordinator	Pelaksana
			Forum perangkat daerah dalam rangka penyusunan propem perda dan propem perkada	Kegiatan	Jumlah kegiatan	1				1	4.000.000	Bagian Hukum	Bagian Hukum
Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	95.70	Melakukan pendampingan penerapan aplikasi umum Bidang Kearsipan (SRIKANDI)	Perangkat Daerah	Jumlah PD yang didampingi	15	17	13		45	500.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip
			Melakukan pengolahan arsip statis melalui aplikasi SIKN JIKN	persen	Persentase digitalisasi arsip arsip statis	100	100	100	100	100	500.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip
Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	3.05	Mengoptimalkan peran walidata dalam Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	persen	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	100	100	100	100	128.950.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh PD
			Mengelola Portal Sedata Sebantul sebagai Portal Penyebarluasan Data	Data	Jumlah Data Terkelola	93688	93688	93688	93688	93688	54.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Semua Perangkat Daerah
			Pendampingan Kegiatan Statistik Sektoral	Persen	Persentase Kegiatan Statistik Sektoral yang Mendapatkan Rekomendasi dari BPS	90	90	90	90	90	67.986.634	Dinas Komunikasi dan Informatika	Semua Perangkat Daerah

Kegiatan Utama	Indikator	Target 2026	Rencana Aksi	Satuan Output	Indikator Output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total	Anggaran	Koordinator	Pelaksana
Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	88	Melakukan bimtek PBJ kepada OPD (<i>Workshop</i> PBJ, Pembinaan Advokasi, Identifikasi Pengadaan, Pengadaan Secara Elektronik) dan Melakukan pendampingan PBJ kepada OPD (SIRUP, Pengadaan Transaksional, Pencatatan Non Tender, <i>e-Purchasing</i>)	Dokumen	Laporan Bimtek dan Pendampingan PBJ	3	3	3	3	12	18.100.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Melaksanakan Pengumuman RUP	Dokumen	Dokumen RUP Kabupaten Bantul	1				1	10.460.000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Melakukan penambahan personil JF PPBJ (atau personil lainnya bersertifikat kompetensi) dan melakukan diklat PBJ	Dokumen	Jumlah SDM pengelola pengadaan yang bertambah dan Laporan Diklat PBJ			300		300	20.000.000	BKPSDM	BKPSDM
			Meningkatkan level kematangan UKPBJ	Dokumen	Dokumen kematangan UKPBJ	2	2	2	3	9	34.526.500	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	3	Melakukan pendampingan dan Verifikasi RKA dan DPA SKPD melalui aplikasi SIPD RI	Dokumen	Dokumen RKA dan DPA yang terverifikasi dan handal	99	99	99	99	396	31.354.900	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset	Semua Perangkat Daerah

Kegiatan Utama	Indikator	Target 2026	Rencana Aksi	Satuan Output	Indikator Output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total	Anggaran	Koordinator	Pelaksana
												Daerah	
			Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang akurat, akuntabel dan tepat waktu	Laporan	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun n-1		1			1	422.721.800	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Semua Perangkat Daerah
			penyusunan KUA-PPAS dan KUPA-PPAS Perubahan akuntabel dan tepat waktu	Dokumen	Dokumen KUA-PPAS dan KUPA-PPAS Perubahan			1	1	2	119.100.200	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Semua Perangkat Daerah
			Penyusunan APBD dan APBD Perubahan Akuntabel dan tepat waktu	Dokumen	Perda dan perbup APBD dan APBD Perubahan			1	1	2	392.812.000	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Semua Perangkat Daerah
			Pemeliharaan basis data PBB P2	Bidang	Penambahan dan pemutahiran data Bidang PBB		8000	8000	16000	32000	979.976.400	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Subyek Pajak Daerah
			Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang Pajak Daerah	Laporan	Laporan atas sosialisasi dan publikasi tentang Pajak Daerah	93	2	16	1	112	3.127.455.600	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Subyek Pajak Daerah
			Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah	Dokumen	Dokumen penerimaan atas tagihan pajak daerah	50275	200150	197300	49370	497095	1.235.790.202	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Subyek Pajak Daerah

Kegiatan Utama	Indikator	Target 2026	Rencana Aksi	Satuan Output	Indikator Output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total	Anggaran	Koordinator	Pelaksana
			Melakukan pengawasan dan monitoring pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	Laporan Pengelolaan barang Milik Daerah	4	4	4	4	16	368.469.000	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Semua Perangkat Daerah
			Pemutakhiran aplikasi Pengelolaan Barang Milik Daerah yang handal	Laporan	Laporan Pemutakhiran aplikasi Pengelolaan BMD				2	2	368.469.000	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Semua Perangkat Daerah
	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	98	Melakukan pemetaan dan inventarisasi data temuan/catatan dan rekomendasi BPK	persen	Persentase catatan/temuan				94	94	22.000.000	Inspektorat	Inspektorat dan Semua Perangkat Daerah
			Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK	Kali	Koordinasi tindak lanjut rekomendasi BPK			1	1	2	1.000.000	Inspektorat	Inspektorat dan Semua Perangkat Daerah
			Melakukan monev tindak lanjut rekomendasi BPK	dokumen	Data tindak lanjut rekomendasi BPK				1	1	1.000.000	Inspektorat	Inspektorat dan Semua Perangkat Daerah
Penguatan Sistem Merit (Integrasi Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN, Penguatan Manajemen Talenta ASN dan Penataan Jabatan	Indeks Sistem Merit	305	Pemetaan kebutuhan ASN berdasarkan penetapan nomenklatur Jabatan yang berbasis analisis jabatan	Dokumen	Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan				1	1	937.500	BKPSDM	BKPSDM

Kegiatan Utama	Indikator	Target 2026	Rencana Aksi	Satuan Output	Indikator Output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total	Anggaran	Koordinator	Pelaksana
Fungsional)													
			Penyelenggaraan manajemen talenta	Dokumen	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Manajemen Talenta				1	1	328.291.000	BKPSDM	BKPSDM
			Pengelolaan kinerja ASN yang terukur	Dokumen	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja	10900	10900	10900	10900	10900	10.875.000	BKPSDM	BKPSDM
			Pengembangan kompetensi ASN sesuai dengan standar kompetensi jabatan dan hasil pengukuran kompetensi ASN	Dokumen	Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi				2	2	1.374.398.000	BKPSDM	BKPSDM
			Pemberian penghargaan dan pengakuan kepada ASN	Dokumen	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	570	288	129	103	1100	937.500	BKPSDM	BKPSDM
			Pengelolaan disiplin, pemberhentian, dan upaya administratif sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku	Dokumen	Dokumen pengelolaan disiplin dan pemberhentian ASN	98	146	86	160	490	35.140.000	BKPSDM	BKPSDM
			Manajemen ASN berbasis teknologi digital yang terintegrasi secara sistem dan data	Dokumen	Dokumen rekap hasil digitalisasi manajemen ASN				1	1	38.037.500	BKPSDM	BKPSDM
Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks BerAkhlak	74.19	Melakukan internalisasi Budaya Kerja kesemua Perangkat daerah dan Unit kerja	Kegiatan	Internalisasi budaya kerja	1		1	1	3	2.500.000	Bagian Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah

Kegiatan Utama	Indikator	Target 2026	Rencana Aksi	Satuan Output	Indikator Output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total	Anggaran	Koordinator	Pelaksana
			Penyusunan Rencana aksi Budaya kerja	Dokumen	Tersusunnya rencana aksi Budaya kerja di setiap PD	1				1	5.000.000	Bagian Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
			Laporan monev pelaksanaan Budaya Pemerintahan	Dokumen	Jumlah dokumen monev pelaksanaan Budaya kerja				1	1	3.000.000	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
			Pengadaan Banner Budaya Kerja sebagai media sosialisasi	Buah	jumlah Banner budaya kerja		30			30	9.000.000	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
			Pemilihan ASN melalui penghargaan Kartika Punggawa Proiotamansari dalam setiap jenjang	Kategori ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan penghargaan Kartika Punggawa Proiotamansari dalam setiap kategori				12	12	20.000.000	BKPSDM	Tim Seleksi
			Penilaian implmentasi core value BerAKHLAK pada setiap ASN melalui aplikasi CVM	kali	Jumlah penilaian ASN melalui CVM	1	1	1	1	4	1.000.000	BKPSDM	BKPSDM
Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survei Kepuasan Masyarakat	91.38	Pendampingan Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Unit Kerja	Jumlah Unit Kerja		47		27	74	50.653.831	Bagian Organisasi	Tim Kerja Fasilitas Yanlik dan Tatalaksana
			Sosialisasi dan implemetasi SKM portal Nasional	Unit Kerja	Jumlah Unit Kerja		47		27	74	3.000.000	Bagian Organisasi	Tim Kerja Fasilitas Yanlik dan Tatalaksana
	Indeks Pelayanan Publik	4.71	Pendampingan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Unit Kerja	Jumlah Unit Kerja		47	78		125	38.962.000	Bagian Organisasi	Tim Kerja PEKPPP

Kegiatan Utama	Indikator	Target 2026	Rencana Aksi	Satuan Output	Indikator Output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total	Anggaran	Koordinator	Pelaksana
			(PEKPPP)										
			Sosialisasi PEKPPdilingkungan UPT	unit Kerja	Jumlah unit Kerja		47	78		125	5.000.000	Bagian Organisasi	Tim Kerja PEKPPP
	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	97.50	Pendampingan Kegiatan Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Unit Kerja	Jumlah Unit Kerja		6			6	13.083.680	Bagian Organisasi	Tim Kerja Fasilitas Yanlik dan Tatalaksana
			Pendampingan dan Sosialisasi evaluasi kepatuhan standar pelayan publik oleh ORI	Unit Kerja	Jumlah Unit Kerja			81		81	13.083.680	Bagian Organisasi	Tim Kerja Fasilitas Yanlik dan Tatalaksana
Pelaksanaan Penilaian Kapabilitas Kelembagaan	Indeks Kapabilitas Kelembagaan	4	Melaksanakan pengoordinasian penilaian mandiri kapabilitas kelembagaan dengan Perangkat Daerah Sampel	Laporan	Laporan pengoordinasian penilaian mandiri kapabilitas kelembagaan				1	1	2.000.000	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
			Melaksanakan penilaian mandiri kapabilitas kelembagaan	Dokumen	Jumlah Dokumen penilaian mandiri kapabilitas kelembagaan				1	1	2.000.000	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
			Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penilaian kapabilitas kelembagaan oleh evaluator KemenpanRB	Laporan	Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil penilaian kapabilitas kelembagaan oleh evaluator KemenpanRB				1	1	2.000.000	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
Pelaksanaan Pemerintah Digital	Indeks Pemerintah Digital (Indeks Pemdi)	1.6	Melaksanakan <i>Clearance</i> Belanja SPBE	Dokumen	Jumlah Dokumen Berita Acara Rekomendasi Rencana dan Anggaran SPBE	10	10			20	12.750.000	Seluruh Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kegiatan Utama	Indikator	Target 2026	Rencana Aksi	Satuan Output	Indikator Output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total	Anggaran	Koordinator	Pelaksana
			Menyusun Laporan Pelaksanaan SPBE/Pemerintah Digital	Dokumen	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan SPBE/Pemerintah Digital				1	1	89.700.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Melaksanakan Pengukuran Kematangan Keamanan Siber dan Sandi	Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengukuran Kematangan Keamanan Siber dan Sandi		1			1	40.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Melaksanakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi sesuai Siklus Pengembangan Aplikasi	Aplikasi	Jumlah Aplikasi yang Dibangun/Dikembangkan sesuai dengan Siklus Pembangunan Aplikasi	48	48	48		48	631.260.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Mengelola Portal Layanan Terintegrasi	Layanan	Jumlah Layanan Terkelola pada Portal Layanan Terintegrasi	73	73	73		73	528.770.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika

II. Reformasi Birokrasi Tematik

Reformasi Birokrasi Tematik diarahkan untuk menyelesaikan akar permasalahan tata kelola di sektor-sektor prioritas sehingga berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Tema Reformasi Birokrasi tematik meliputi:

1. Pengentasan Kemiskinan;
2. Realisasi Investasi;
3. Mendorong Hilirisasi;
4. Mendukung Ketahanan Pangan;
5. Mendorong Peningkatan Mutu dan Akses Layanan Kesehatan; dan
6. Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan;

Tabel 2. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Pengentasan Kemiskinan

Sasaran tema : Menurunnya Angka Kemiskinan
Indikator : Prosentase Penduduk Miskin
Target : 9,39 - 9,67 %

Permasalahan	Sasaran Permasalahan	Indikator Permasalahan	Target	Satuan Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
						Indikator Output	Satuan Output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Target Total				
Kualitas dan kete aduan database Penanggulang an Kemiskinan belum Optimal	Tersedianya database pengentasan kemiskinan yang lengkap, te adu dan terupdate	Cakupan Basis Data Te adu	75	Persen	Verifikasi dan Validasi Data secara Periodik	Presentase penduduk yang terdata dalam basis data daerah	Orang	-	25	25	25	75	202.500.000	Proses Bisnis dan SOP	Dinas Sosial	Dinas Sosial
Kualitas dan kete aduan database Penanggulang an Kemiskinan belum Optimal	Tersedianya database pengentasan kemiskinan yang lengkap, te adu dan terupdate	Cakupan Basis Data Te adu	75	Persen	Updating Data Penerima Program Bansos	Jumlah Dokumen Penetapan Data Penerima Program Bansos	Laporan	5	5	5	5	20	43.804.724	Proses Bisnis dan SOP	Dinas Sosial	Dinas Sosial
Kualitas dan kete aduan database Penanggulang an Kemiskinan belum Optimal	Tersedianya database pengentasan kemiskinan yang lengkap, te adu dan terupdate	Cakupan Basis Data Te adu	75	Persen	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	6	8	8	8	30	8.375.000	Proses Bisnis dan SOP	Dinas Sosial	Dinas Sosial
Kete aduan Perencanaan dan penganggaran pengentasan kemiskinan belum optimal	Terwujudnya kete aduan Perencanaan dan penganggaran pengentasan	Dokumen teknis perencanaan program	3	Dokum en	Menyusun Rencana Aksi Tahunan Penanggulang an Kemiskinan	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Tahunan Penanggulang an Kemiskinan	Dokumen	1	-	-	-	1	2.125.000	Perencanaan dan Penganggaran	Bappeda	Bappeda dan PD

Permasalahan	Sasaran Permasalahan	Indikator Permasalahan	Target	Satuan Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
						Indikator Output	Satuan Output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Target Total				
antar instansi dan lintas sektor	kemiskinan															
Kete aduan Perencanaan dan penganggaran pengentasan kemiskinan belum optimal antar instansi dan lintas sektor	Terwujudnya kete aduan Perencanaan dan penganggaran pengentasan kemiskinan	Dokumen teknis perencanaan program	3	Dokumen	Fasilitasi Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulang an Kemiskinan Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulang an Kemiskinan Daerah	Kegiatan	1	1	1	1	4	4.250.000	Perencanaan dan Penganggaran	Bappeda	Bappeda dan PD
Kete aduan Perencanaan dan penganggaran pengentasan kemiskinan belum optimal antar instansi dan lintas sektor	Terwujudnya kete aduan Perencanaan dan penganggaran pengentasan kemiskinan	Dokumen teknis perencanaan program	3	Dokumen	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	dokumen	-	-	-	1	1	75.000.000	Perencanaan dan Penganggaran	DPUPKP	DPUPKP dan Mitra
Kete aduan Perencanaan dan penganggaran pengentasan kemiskinan belum optimal antar instansi dan lintas sektor	Terwujudnya kete aduan Perencanaan dan penganggaran pengentasan kemiskinan	Dokumen teknis perencanaan program	3	Dokumen	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	dokumen	-	3	-	-	3	175.000.000	Perencanaan dan Penganggaran	DPUPKP	DPUPKP dan Mitra

Permasalahan	Sasaran Permasalahan	Indikator Permasalahan	Target	Satuan Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
						Indikator Output	Satuan Output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Target Total				
Tingginya beban pengeluaran warga miskin	Terlaksananya program perlindungan sosial warga miskin yang tepat sasaran	Persentase PPKS yang terlindungi dengan bantuan atau jaminan sosial	70	Persen	Pelaksanaan Program Boga Sehat	Jumlah orang yang mendapatkan program boga sehat	orang	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112	8.173.200.000	Lain-lain	Dinas Sosial	Dinas Sosial, Kalurahan dan Mitra
Tingginya beban pengeluaran warga miskin	Terlaksananya program perlindungan sosial warga miskin yang tepat sasaran	Persentase PPKS yang terlindungi dengan bantuan atau jaminan sosial	70	Persen	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	8	10	10	10	38	64.000.000	Lain-lain	Dinas Sosial	Dinas Sosial dan Mltra
Tingginya beban pengeluaran warga miskin	Terlaksananya program perlindungan sosial warga miskin yang tepat sasaran	Persentase PPKS yang terlindungi dengan bantuan atau jaminan sosial	70	Persen	Pelaksanaan Program Bansos Sambung Pangan Bantul	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan program bansos sambung pangan	Keluarga Penerima Manfaat	-	1.000	1.000	-	1.000	1.200.000.000	Lain-lain	Dinas Sosial	Dinas Sosial
Tingginya beban pengeluaran warga miskin	Terlaksananya program perlindungan sosial warga miskin yang tepat sasaran	Persentase PPKS yang terlindungi dengan bantuan atau jaminan sosial	70	Persen	Pelaksanaan Program Boga Sehat	Jumlah orang yang mendapatkan program boga sehat	orang	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	Lain-lain	Dinkes	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Jamkesda dan pendamping TKSK

Permasalahan	Sasaran Permasalahan	Indikator Permasalahan	Target	Satuan Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
						Indikator Output	Satuan Output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Target Total				
Tingginya beban pengeluaran warga miskin	Terlaksananya program perlindungan sosial warga miskin yang tepat sasaran	Persentase PPKS yang terlindungi dengan bantuan atau jaminan sosial	70	Persen	Penyediaan Bantuan luran BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan	Jumlah Pekerja Rentan yang Menerima Bantuan luran BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan	Orang	2.682	2.682	2.682	2.682	2.682	366.511.392	Inovasi	Disnakertrans	Disnakertrans
Kurangnya Ketersediaan Sarana Prasarana Dasar Untuk Masyarakat Miskin	Terlaksananya penyediaan akses air minum dan rumah layak bagi warga miskin	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	99,14	Persen	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	unit rumah	-	12	9		21	420.000.000	Lain-lain	DPUPKP	DPUPKP dan Mitra
Kurangnya Ketersediaan Sarana Prasarana Dasar Untuk Masyarakat Miskin	Terlaksananya penyediaan akses air minum dan rumah layak bagi warga miskin	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	99,14	Persen	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	unit rumah	-	8	3		11	385.000.000	Lain-lain	DPUPKP	DPUPKP dan Mitra
Kurangnya Ketersediaan Sarana Prasarana Dasar Untuk Masyarakat Miskin	Terlaksananya penyediaan akses air minum dan rumah layak bagi warga miskin	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	99,14	Persen	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegehan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki dalam Rangka Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya	unit rumah	-	20	-		20	400.000.000	Lain-lain	DPUPKP	DPUPKP dan Mitra

Permasalahan	Sasaran Permasalahan	Indikator Permasalahan	Target	Satuan Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
						Indikator Output	Satuan Output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Target Total				
					Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha										
Kurangnya Ketersediaan Sarana Prasarana Dasar Untuk Masyarakat Miskin	Terlaksananya penyediaan akses air minum dan rumah layak bagi warga miskin	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	99,14	Persen	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan terhadap Kumuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	unit rumah	-	18	11		29	1.015.000.000	Lain-lain	DPUPKP	DPUPKP dan Mitra
Kurangnya Ketersediaan Sarana Prasarana Dasar Untuk Masyarakat Miskin	Terlaksananya penyediaan akses air minum dan rumah layak bagi warga miskin	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	99,14	Persen	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Koordinasi CSR dalam intervensi penanggulangan kemiskinan	perusahaan	-	-	-	10	10	14.497.500	Perencanaan dan Penganggaran	Bappeda	Bappeda dan Mitra
Kurangnya Ketersediaan Sarana Prasarana Dasar Untuk Masyarakat	Terlaksananya penyediaan akses air minum dan rumah layak bagi warga	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan	99,14	Persen	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Pe	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Peipaan yang	liter/detik				3	3	1.649.700.000	Lain-lain	DPUPKP	DPU PKP dan Mitra

Permasalahan	Sasaran Permasalahan	Indikator Permasalahan	Target	Satuan Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
						Indikator Output	Satuan Output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Target Total				
Miskin	miskin	Berkelanjutan			ipaan	ditingkatkan										
Kurangnya Ketersediaan Sarana Prasarana Dasar Untuk Masyarakat Miskin	Terlaksananya penyediaan akses air minum dan rumah layak bagi warga miskin	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	99,14	Persen	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Pe ipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Pe ipaan	SR				264	264	598.488.000	Lain-lain	DPUPKP	DPUPKP dan Mitra
Pemberdayaan warga miskin belum optimal	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat	Kegiatan pendampingan dan pemberdayaan	11	Kegiatan	Fasilitasi Pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK1)	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Kartu Pencari Kerja (AK1)	Orang	100	100	100	100	400	37,500,000	Sumber Daya Manusia	Disnakertrans	Disnakertrans dan Mitra
Pemberdayaan warga miskin belum optimal	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat	Kegiatan pendampingan dan pemberdayaan	11	Kegiatan	Pelatihan keterampilan disabilitas	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan pelatihan keterampilan	Orang	-	40	-	-	40	50.369.000	Sumber Daya Manusia	Disnakertrans	Disnakertrans dan Mitra
Pemberdayaan warga miskin belum optimal	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat	Kegiatan pendampingan dan pemberdayaan	11	Kegiatan	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	orang	2.028	-	-	-	2.028	6.932.962.296	Sumber Daya Manusia	Disnakertrans	Disnakertrans dan Mitra

Permasalahan	Sasaran Permasalahan	Indikator Permasalahan	Target	Satuan Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
						Indikator Output	Satuan Output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Target Total				
Pemberdayaan warga miskin belum optimal	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat	Kegiatan pendampingan dan pemberdayaan	11	Kegiatan	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	orang	-	-	150	-	150	29.725.000	Sumber Daya Manusia	Disnakertrans	Disnakertrans dan Mitra
Pemberdayaan warga miskin belum optimal	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat	Kegiatan pendampingan dan pemberdayaan	11	Kegiatan	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	kepala keluarga	-	-	-	1	1	28.010.000	Sumber Daya Manusia	Disnakertrans	Disnakertrans dan Mitra
Pemberdayaan warga miskin belum optimal	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat	Kegiatan pendampingan dan pemberdayaan	11	Kegiatan	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	orang	875	875	875	875	3.500	67.507.200	Sumber Daya Manusia	Disnakertrans	Disnakertrans dan Mitra
Pemberdayaan warga miskin belum optimal	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat	Kegiatan pendampingan dan pemberdayaan	11	Kegiatan	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	orang	-	64	80	-	144	578.989.444	Sumber Daya Manusia	UPTD BLK	UPTD BLK dan Mitra

Permasalahan	Sasaran Permasalahan	Indikator Permasalahan	Target	Satuan Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
						Indikator Output	Satuan Output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Target Total				
Pemberdayaan warga miskin belum optimal	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat	Kegiatan pendampingan dan pemberdayaan	11	Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Pelatihan dan Pendampingan Usaha Mikro	Jumlah Orang yang mendapatkan pelatihan dan pendampingan usaha mikro	Orang	-	200	-	-	200	245.049.650	Sumber Daya Manusia	DKUKMPP	DKUKMPP dan Mitra
Pemberdayaan warga miskin belum optimal	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat	Kegiatan pendampingan dan pemberdayaan	11	Kegiatan	Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan	Jumlah KWT penerima pelatihan	Kelompok	-	-	22	-	46	620.000.000	Sumber Daya Manusia	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Mitra
Pemberdayaan warga miskin belum optimal	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat	Kegiatan pendampingan dan pemberdayaan	11	Kegiatan	Budidaya Pembenihan ikan, Pelatihan perikanan budidaya, Demplot Gapura Samudra	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	7	14	7	-	28	576.318.000	Sumber Daya Manusia	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan dan Mitra
Pemberdayaan warga miskin belum optimal	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat	Kegiatan pendampingan dan pemberdayaan	11	Kegiatan	Pelatihan Peningkatan Ekonomi Kalurahan	Jumlah orang yang memperoleh pelatihan peningkatan ekonomi	Orang	317	317	-	-	634	209.542.500	Sumber Daya Manusia	DPMKal	DPMKal

Permasalahan	Sasaran Permasalahan	Indikator Permasalahan	Target	Satuan Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
						Indikator Output	Satuan Output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Target Total				
Pengawasan dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Belum Optimal	Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan secara komprehensif	Jumlah dokumen tata kelola dan hasil evaluasi program penanggulangan kemiskinan	3	Dokumen	Penyusunan SOP Audit Kinerja Kinerja	Jumlah Dokumen SOP	Dokumen	-	-	-	1	1	1.250.000	Proses Bisnis dan SOP	Inspektorat	Inspektorat
Pengawasan dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Belum Optimal	Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan secara komprehensif	Jumlah dokumen tata kelola dan hasil evaluasi program penanggulangan kemiskinan	3	Dokumen	Pelaksanaan Audit Kinerja Program Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Hasil Audit Kinerja Program Penanggulangan Kemiskinan	Laporan	-	-	-	1	1	1.250.000	Proses Bisnis dan SOP	Inspektorat	Inspektorat
Pengawasan dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Belum Optimal	Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan secara komprehensif	Jumlah dokumen tata kelola dan hasil evaluasi program penanggulangan kemiskinan	3	Dokumen	Penyusunan Manajemen Risiko Program Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Dokumen Manajemen Risiko Program Penanggulangan Kemiskinan	Dokumen	-	-	-	1	1	1.250.000	Proses Bisnis dan SOP	Inspektorat	Inspektorat

Tabel 3. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Realisasi Investasi

Sasaran : Meningkatnya Nilai Investasi
Indikator : Nilai Investasi
Target : 566,42 Milyar Rupiah

Permasalahan	Sasaran Permasalahan	Indikator Permasalahan	Target	Satuan	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
						Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
Layanan perizinan dan non perizinan belum optimal	Meningkatkan kualitas layanan perizinan dan non perizinan.	Persentase permohonan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai ketentuan	99	Persen	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Te adu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	pelaku usaha	450	450	450	450	1800	447.984.500	Proses Bisnis dan SOP	DPMPTSP	DPMPTSP dan Stakeholder pemangku Sektor
Layanan perizinan dan non perizinan belum optimal	Meningkatkan kualitas layanan perizinan dan non perizinan.	Persentase permohonan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai ketentuan	99	Persen	Fasilitasi pembuatan dan pengisian akun SIINas	Jumlah IKM yang difasilitasi pembuatan akun SIINas	IKM	-	60	20	-	80	12.478.000	Proses Bisnis dan SOP	DPMPTSP	DKUKMPP
Layanan perizinan dan non perizinan belum optimal	Meningkatkan kualitas layanan perizinan dan non perizinan.	Persentase permohonan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai ketentuan	99	Persen	Fasilitasi penyusunan laporan data industri melalui akun SIINas	Jumlah IKM yang difasilitasi Penyusunan Laporan Data Industri	IKM		-	-	40	40	5.634.200	Proses Bisnis dan SOP	DPMPTSP	DKUKMPP

Permasalahan	Sasaran Permasalahan	Indikator Permasalahan	Target	Satuan	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
						Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
Layanan perizinan dan non perizinan belum optimal	Meningkatkan kualitas layanan perizinan dan non perizinan.	Persentase permohonan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai ketentuan	99	Persen	Sosialisasi Perizinan Berusaha Sektor Industri	Jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi	IKM	230	-	-	-	230	38.059.500	Proses Bisnis dan SOP	DPMPTSP	DKUKMPP
Layanan perizinan dan non perizinan belum optimal	Meningkatkan kualitas layanan perizinan dan non perizinan.	Persentase permohonan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai ketentuan	99	Persen	Fasilitasi Perizinan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi perizinan	Unit usaha	-		15	-	15	3.214.500	Proses Bisnis dan SOP	DPMPTSP	DKUKMPP
Reklame sudah memenuhi kewajiban pembayaran pajak , namun belum memperoleh/ mengurus izin penyelenggaraan	Sosialisasi reklame, FGD Reklame, Pendataan	Persentase permohonan pajak reklame dan perijinannya	70	Persen	Melakukan integrasi pajak reklame dengan Ijin penyelenggaraan	Jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah Reklame	dokumen	700	300	250	200	1.450	10.800.000	Proses Bisnis dan SOP	DPMPTSP	BPKPAD
Belum optimalnya pemanfaatan data dan teknologi informasi penanaman modal	Meningkatkan pemanfaatan data dan teknologi informasi penanaman modal	Persentase pemanfaatan data dan teknologi informasi penanaman modal	100	Persen	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan	dokumen	-	-	-	2	2	0	Perencanaan dan Penganggaran	DPMPTSP	DPMPTSP, DISKOMINFO DKUKMP

Permasalahan	Sasaran Permasalahan	Indikator Permasalahan	Target	Satuan	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
						Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
						Dimanfaatkan										
kepatuhan pelaku usaha dalam melaporkan LKPM masih kurang	Meningkatnya pelaku usaha tertib LKPM (laporan Kegiatan penanaman modal)	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Tertib LKPM	22	Persen	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	kegiatan usaha	10	10	10	-	30	3.000.000	Pengawasan	DPMPTSP	DPMPTSP dan Stakeholder pemangku Sektor
kepatuhan pelaku usaha dalam melaporkan LKPM masih kurang	Meningkatnya pelaku usaha tertib LKPM (laporan Kegiatan penanaman modal)	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Tertib LKPM	22	Persen	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	pelaku usaha	-	25	-	-	25	2.300.000	Sumber Daya Manusia	DPMPTSP	DPMPTSP dan Stakeholder pemangku Sektor
kepatuhan pelaku usaha dalam melaporkan LKPM masih kurang	Meningkatnya pelaku usaha tertib LKPM (laporan Kegiatan penanaman modal)	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Tertib LKPM	22	Persen	Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Jumlah kegiatan pengawasan permohonan	kegiatan usaha	-	6	6	2	14		Pengawasan	DPMPTSP	DPMPTSP dan Stakeholder pemangku Sektor

Permasalahan	Sasaran Permasalahan	Indikator Permasalahan	Target	Satuan	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordi-nator	Pelaksana
						Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
potensi terjadinya perselisihan hubungan industrial	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Bimtek Hubungan Industrial, Sosialisasi Norma Ketenagakerjaan Pada Perusahaan, Sosialisasi UMK, Workshop Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial,	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang Dicegah	20	perkara	Menciptakan iklim usaha yang kondusif	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang Dicegah	perkara	5	5	5	5	20	36.650.000	Sumber Daya Manusia	DPMPTSP	Disnakertrans

Tabel 4. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Mendorong Hilirisasi.

Sasaran : Meningkatnya Produktivitas Sektor Olahan yang menjadi Unggulan Daerah

Indikator : Rasio PDRB Industri Pengolahan

Target : 14,2 %

Permasalahan	Sasaran Permasalahan	Indikator Permasalahan	Target	Satuan target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
						Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
Layanan perizinan usaha UMKM/IKM masih perlu ditingkatkan kualitasnya	Meningkatnya kualitas layanan perizinan usaha UMKM / IKM	Prosentase usaha mikro ber NIB	76,16	Persen	Fasilitasi Perizinan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi perizinan	Unit usaha			15		15	3.214.500	Proses Bisnis dan SOP	DKUKMPP	DKUKMPP
Layanan perizinan usaha UMKM/IKM masih perlu ditingkatkan kualitasnya	Meningkatnya kualitas layanan perizinan usaha UMKM / IKM	Prosentase usaha mikro ber NIB	76,16	Persen	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit usaha	1	1	2	3	7	53.829.000	Proses Bisnis dan SOP	DKUKMPP	DKP
Layanan perizinan usaha UMKM/IKM masih perlu ditingkatkan kualitasnya	Meningkatnya kualitas layanan perizinan usaha UMKM/ IKM	Prosentase usaha mikro ber NIB	76,16	Persen	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen				1	1	31.800.000	Proses Bisnis dan SOP	DKUKMPP	DKP

Permasalahan	Sasaran Permasalahan	Indikator Permasalahan	Target	Satuan target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
						Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
					Kabupaten/Kota											
Layanan perizinan usaha UMKM/IKM masih perlu ditingkatkan kualitasnya	Meningkatnya kualitas layanan perizinan usaha UMKM/IKM	Prosentase usaha mikro ber NIB	76,16	Persen	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	10	20	30	40	100	161.038.100	Proses Bisnis dan SOP	DKUKMPP	DKP
Layanan perizinan usaha UMKM/IKM masih perlu ditingkatkan kualitasnya	Meningkatnya kualitas layanan perizinan usaha UMKM/IKM	Prosentase usaha mikro ber NIB	76,16	Persen	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku usaha	1	2	4	5	12	216.734.335	Proses Bisnis dan SOP	DKUKMPP	DKP
Layanan perizinan usaha UMKM/IKM masih perlu ditingkatkan kualitasnya	Meningkatnya kualitas layanan perizinan usaha UMKM/IKM	Prosentase usaha mikro ber NIB	76,16	Persen	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku usaha	10	40	40	15	105	7.185.100	Proses Bisnis dan SOP	DKUKMPP	DKP
Layanan perizinan usaha UMKM/IKM masih perlu ditingkatkan kualitasnya	Meningkatnya kualitas layanan perizinan usaha UMKM/IKM	Prosentase usaha mikro ber NIB	76,16	Persen	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku usaha	20	35	35	20	110	193.361.337	Proses Bisnis dan SOP	DKUKMPP	DKP
Layanan perizinan usaha UMKM/IKM masih perlu ditingkatkan kualitasnya	Meningkatnya kualitas layanan perizinan usaha UMKM/IKM	Prosentase usaha mikro ber NIB	76,16	Persen	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk	Orang	20	35	35	20	110	30.921.200	Sumber Daya Manusia	DKUKMPP	DKP

Permasalahan	Sasaran Permasalahan	Indikator Permasalahan	Target	Satuan target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
						Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
Tingginya risiko investasi usaha pengolahan bahan pangan lokal serta kurangnya daya saing produk pangan lokal dibandingkan dengan produk pabrikan	Meningkatnya daya saing produk	Prosentase pelaku usaha yang memperoleh pemberian insentif fiskal dan atau non fiskal.	100	Persen	Fasilitasi dalam rangka pemberian insentif keringanan Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka penanaman modal di Kabupaten Bantul	Jumlah calon investor yang difasilitasi insentif fiskal pengurangan pajak bumi dan bangunan	calon investor	25	1			26	44.550.000	Proses Bisnis dan SOP	DKUKMPP	BPKPAD
Tingginya risiko investasi usaha pengolahan bahan pangan lokal serta kurangnya daya saing produk pangan lokal dibandingkan dengan produk pabrikan	Meningkatnya daya saing produk	Prosentase pelaku usaha yang memperoleh pemberian insentif fiskal dan atau non fiskal.	100	Persen	Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Kemudahan perizinan dalam rangka pemberian insentif bagi investor / penanaman modal di Kabupaten Bantul	Jumlah kegiatan fasilitasi insentif fiskal dan atau non fiskal yang dilaksanakan	kegiatan	0	1			1	3.800.000	Proses Bisnis dan SOP	DKUKMPP	DPMPTSP
Tingginya risiko investasi usaha pengolahan bahan pangan lokal serta kurangnya daya saing produk pangan lokal dibandingkan dengan produk pabrikan	Meningkatnya daya saing produk	Prosentase pelaku usaha yang memperoleh pemberian insentif fiskal dan atau non fiskal.	100	Persen	Pendampingan Perizinan kepada Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi pendampingan perizinan usaha	pelaku usaha	450	450	450	450	1800	447.984.500	Proses Bisnis dan SOP	DKUKMPP	DPMPTSP

Permasalahan	Sasaran Permasalahan	Indikator Permasalahan	Target	Satuan target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
						Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
Tingginya risiko investasi usaha pengolahan bahan pangan lokal serta kurangnya daya saing produk pangan lokal dibandingkan dengan produk pabrikan	Meningkatkan daya saing produk	Prosentase pelaku usaha IKM, UMKM yang ditingkatkan pengetahuan dan ketrampilannya	100	Persen	Pelatihan diversifikasi produk	Jumlah pelaku IKM yang difasilitasi Pelatihan Diversifikasi Produk	pelaku IKM	20	180	60		260	369.889.000	Proses Bisnis dan SOP	DKUKMPP	DKUKMPP
Tingginya risiko investasi usaha pengolahan bahan pangan lokal serta kurangnya daya saing produk pangan lokal dibandingkan dengan produk pabrikan	Meningkatkan daya saing produk	Prosentase pelaku usaha IKM, UMKM yang ditingkatkan pengetahuan dan ketrampilannya	100	Persen	Pelatihan Produk IKM	Jumlah pelaku IKM yang difasilitasi Pelatihan Produk IKM	pelaku IKM	18		72		90	120.600.000	Proses Bisnis dan SOP	DKUKMPP	DKUKMPP
Tingginya risiko investasi usaha pengolahan bahan pangan lokal serta kurangnya daya saing produk pangan lokal dibandingkan dengan produk pabrikan	Meningkatkan daya saing produk	Prosentase pelaku usaha IKM, UMKM yang ditingkatkan pengetahuan dan ketrampilannya	100	Persen	Pelatihan Olahan Pangan	Jumlah pelaku IKM yang difasilitasi Pelatihan Olahan Pangan	pelaku IKM	20	180	180	40	420	592.617.500	Proses Bisnis dan SOP	DKUKMPP	DKUKMPP

Permasalahan	Sasaran Permasalahan	Indikator Permasalahan	Target	Satuan target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
						Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
Tingginya risiko investasi usaha pengolahan bahan pangan lokal serta kurangnya daya saing produk pangan lokal dibandingkan dengan produk pabrikan	Meningkatkan daya saing produk	Prosentase pelaku usaha IKM, UMKM yang ditingkatkan pengetahuan dan ketrampilannya	100	Persen	Pelatihan Pemberdayaan usaha mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	unit usaha		200	20		220	220.279.400	Proses Bisnis dan SOP	DKUKMPP	DKUKMPP
Tingginya Risiko investasi Usaha Pengolahan bahan pangan lokal serta Kurangnya Daya saing produk pangan lokal dibandingkan dengan produk pabrikan	Meningkatkan daya saing produk	Prosentase pelaku usaha IKM, UMKM yang ditingkatkan pengetahuan dan ketrampilannya	100	Persen	Penguatan dan Pembinaan Koperasi	Jumlah Unit Usaha koperasi yang difasilitasi untuk Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha				40	40	6.059.736	Sumber Daya Manusia	DKUKMPP	DKUKMPP dan Mitra
Kurangnya Daya saing produk	Meningkatnya daya saing produk	Prosentase pelaku usaha IKM, UMKM yang ditingkatkan pengetahuan dan ketrampilannya	100	Persen	Pojok Konsultasi UMKM	Jumlah UMKM yang difasilitasi	UMKM	20				20	3.603.309	Sumber Daya Manusia	DKUKMPP	DKUKMPP
Akselerasi Legalitas UMKM belum optimal	Terwujudnya kemudahan, kecepatan layanan Legalitas UMKM	Cakupan legalitas produk UMKM binaan yang diterbitkan pada tahun yang dievaluasi	95	Persen	Fasilitasi Sertifikasi halal	Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha					32	32	200.000.000	Proses Bisnis dan SOP	DKUKMPP	DKUKMPP

Permasalahan	Sasaran Permasalahan	Indikator Permasalahan	Target	Satuan target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
						Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
Akselerasi Legalitas UMKM belum optimal	Terwujudnya kemudahan, kecepatan layanan Legalitas UMKM	Cakupan legalitas produk UMKM binaan yang diterbitkan pada tahun yang dievaluasi	95	Persen	Fasilitasi Sertifikasi PIRT	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi Sertifikasi PIRT	Pelaku usaha		50	50		100	146.362.500	Proses Bisnis dan SOP	DKUKMPP	Dinkes
Pelaku usaha IKM kesulitan memahami persyaratan pemenuhan verifikasi standar kegiatan usaha risiko menengah-tinggi	Penerbitan perizinan berusaha sektor industri untuk risiko menengah tinggi - tinggi	Persentase perizinan berusaha sektor industri yang diterbitkan	100	Persen	Sosialisasi perizinan berusaha sektor industri	Jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi	IKM	230				230	38.059.500	Teknologi dan Informasi	DKUKMPP	DKUKMPP
Pelaku usaha IKM kesulitan memahami persyaratan pemenuhan verifikasi standar kegiatan usaha risiko menengah-tinggi	Penerbitan perizinan berusaha sektor industri untuk risiko menengah tinggi - tinggi	Persentase perizinan berusaha sektor industri yang diterbitkan	100	Persen	Fasilitasi pembuatan dan pengisian akun SIINas	Jumlah IKM yang difasilitasi pembuatan akun SIINas	IKM		60	20		80	12.478.000	Teknologi dan Informasi	DKUKMPP	DKUKMPP
Pelaku usaha IKM kesulitan memahami persyaratan pemenuhan verifikasi standar kegiatan usaha risiko menengah-tinggi	Penerbitan perizinan berusaha sektor industri untuk risiko menengah tinggi - tinggi	Persentase perizinan berusaha sektor industri yang diterbitkan	100	Persen	Fasilitasi penyusunan laporan data industri triwulanan melalui akun SIINas	Jumlah IKM yang difasilitasi Penyusunan Laporan Data Industri	IKM				40	40	5.634.200	Teknologi dan Informasi	DKUKMPP	DKUKMPP

Permasalahan	Sasaran Permasalahan	Indikator Permasalahan	Target	Satuan target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
						Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
Alat UTTP (Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan) pada pelaku usaha, unit usaha, UMKM, IKM, pedagang yang digunakan belum bertanda tera sah yang berlaku	Kalibrasi Alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	Persentase alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	71	Persen	Optimalisasi kegiatan terang jempol ke pasar terdekat dengan lokasi pelaku usaha	Jumlah alat UTTP yang ditera ulang	2000 unit	500	500	500	500	2000	263.564.088	Sumber Daya Manusia	DKUKMPP	DKUKMPP
Alat UTTP (Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan) pada pelaku usaha, unit usaha, UMKM, IKM, pedagang yang digunakan belum bertanda tera sah yang berlaku	Kalibrasi Alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	Persentase alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	71	Persen	Pembinaan/so sialisasi kalibrasi metrologi langsung ke pelaku usaha	Jumlah pelaku usaha yang bidang metrologi legal yang dibina	20 orang	5	5	5	5	20	11.192.000	Pengawasan	DKUKMPP	DKUKMPP
Fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual bagi Sentra IKM belum menjangkau secara luas	Tersedianya fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual bagi Sentra IKM	Jumlah Sentra yang difasilitasi sertifikasi Indikasi Geografis	1	Sentra	Fasilitasi Indikasi Geografis untuk sentra IKM	Sertifikat Indikasi Geografis	Dokumen				1	1	4.090.000	Inovasi	DKUKMPP	DKUKMPP

Permasalahan	Sasaran Permasalahan	Indikator Permasalahan	Target	Satuan target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
						Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
Regulasi yang mendukung pembangunan industri di Tingkat Kabupaten belum memadai	Adanya regulasi daerah dan turunannya yang menjadi dasar pelaksanaan program industri di tingkat kabupaten	Regulasi daerah dan turunannya yang menjadi dasar pelaksanaan program industri di tingkat kabupaten	3	Dokumen	Penyusunan Perda tentang Penyelenggaraan Gudang dan Produk Turunannya	Jumlah peraturan daerah dan produk turunannya yang disusun pada tahun n	Dokumen		1			1	875.000	Proses Bisnis dan SOP	DKUKMPP	DKUKMPP
Regulasi yang mendukung pembangunan industri di Tingkat Kabupaten belum memadai	Adanya regulasi daerah dan turunannya yang menjadi dasar pelaksanaan program industri di tingkat kabupaten	Regulasi daerah dan turunannya yang menjadi dasar pelaksanaan program industri di tingkat kabupaten	3	Dokumen	Penyusunan / Review Perda tentang RTRW	Jumlah dokumen tentang penyusunan/review Perda tentang RTRW	Dokumen				1	1	105.300.000	Proses Bisnis dan SOP	DKUKMPP	DPTR
Regulasi yang mendukung pembangunan industri di Tingkat Kabupaten belum memadai	Adanya regulasi daerah dan turunannya yang menjadi dasar pelaksanaan program industri di tingkat kabupaten	Regulasi daerah dan turunannya yang menjadi dasar pelaksanaan program industri di tingkat kabupaten	3	Dokumen	Penyusunan / Review Perda tentang RIPIK	Jumlah dokumen tentang penyusunan/review Perda tentang RIPIK	Dokumen				1	1	250.000	Proses Bisnis dan SOP	DKUKMPP	DKUKMPP

Permasalahan	Sasaran Permasalahan	Indikator Permasalahan	Target	Satuan target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
						Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
Kualitas sarana perdagangan belum memadai	Peningkatan kualitas sarana perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	53	Persen	Pembangunan / Rehabilitasi Pasar Rakyat	Jumlah pasar yang direhabilitasi	Unit				6	6	582.670.000	Proses Bisnis dan SOP	DKUKMPP	DKUKMPP
Kualitas sarana perdagangan belum memadai	Peningkatan kualitas sarana perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	53	Persen	Pemeliharaan Pasar Rakyat	Jumlah pasar yang dilakukan pemeliharaan	Unit	0	1	1	6	8	49.064.000	Proses Bisnis dan SOP	DKUKMPP	DKUKMPP
Kualitas sarana perdagangan belum memadai	Peningkatan kualitas sarana perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	53	Persen	Pembinaan dan Pemberdayaan sumber daya pengelolaan pasar rakyat	Jumlah pasar rakyat yang ditingkatkan kualitas sumber daya dan SDM-nya.	Unit	-	2	-		2	12.848.000	Inovasi	DKUKMPP	DKUKMPP

Tabel 5. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Mendukung Ketahanan Pangan

Sasaran : Meningkatkan produktivitas hasil pertanian yang mendukung ketahanan pangan

Indikator : Indeks Ketahanan Pangan

Target : 76,83

Permasalahan	Sasaran Permasalahan	Indikator Permasalahan	Target	Satuan Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
						Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
Jaminan mutu dan keamanan pangan di masyarakat masih rendah;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	95.78	Persen	Pelatihan Budidaya Ternak Ayam	Jumlah Pelatihan Budidaya Ternak Ayam	Kelompok	-	-	20	-	20	465.000.000	Sumber Daya Manusia	DKPP	DKPP
Jaminan mutu dan keamanan pangan di masyarakat masih rendah;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	95.79	Persen	Pelatihan Budidaya Ternak	Jumlah Pelatihan Budidaya Ternak	Kelompok	-	5	2	-	7	240.000.000	Sumber Daya Manusia	DKPP	DKPP
Jaminan mutu dan keamanan pangan di masyarakat masih rendah;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	95.80	Persen	Kegiatan pemanfaatan pekarangan	Jumlah Kelompok Wanita Tani (KWT) yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan pekarangan	KWT	-	24	22		46	620.000.000	Sumber Daya Manusia	DKPP	DKPP
Jaminan mutu dan keamanan pangan di masyarakat masih	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	95.81	Persen	Kegiatan UPPKA (Usaha peningkatan pendapatan keluarga	Jumlah Kader KB yang melaksanakan kegiatan UPPKA (Usaha	Kader/ Apsektor KB		75			75	4.700.000	Sumber Daya Manusia	DP3APPKB	DP3APPKB

Permasalahan	Sasaran Permasalahan	Indikator Permasalahan	Target	Satuan Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
						Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
rendah;					akseptor)	peningkatan pendapatan keluarga akseptor)										
Jaminan mutu dan keamanan pangan di masyarakat masih rendah;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	95.82	Persen	Gerakan Pangan Murah	Jumlah Gerakan Pangan Murah	Kali	-	1	-	1	2	47.779.800	Lain-lain	DKPP	DKPP
Jaminan mutu dan keamanan pangan di masyarakat masih rendah;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	95.83	Persen	Penyelenggaraan Pasar Tani	Jumlah penyelenggaraan Pasar Tani	Kali	21	26	27	26	100	4.257.500	Lain-lain	DKPP	DKPP
Jaminan mutu dan keamanan pangan di masyarakat masih rendah;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	95.84	Persen	Pemantauan ketersediaan dan harga yang dimanfaatkan untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga komoditas pangan pokok/strategis di tingkat distributor/pelaku usaha	Jumlah pemantauan ketersediaan dan harga barang pokok dan penting di tingkat distributor/ pelaku usaha	Kali	3	3	3	3	12	5.450.000	Pengawasan	DKUKMPP	DKUKMPP
Jaminan mutu dan keamanan pangan di masyarakat	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan	Skor Pola Pangan Harapan	95.85	Persen	Pemantauan ketersediaan dan harga yang	Jumlah pemantauan ketersediaan dan harga	Kali	3	3	3	3	12	22.225.000	Lain-lain	DKUKMPP	DKUKMPP

Permasalahan	Sasaran Permasalahan	Indikator Permasalahan	Target	Satuan Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
						Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
masih rendah;	pangan hasil pertanian				dimanfaatkan untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga komoditas pangan pokok/strategis di tingkat konsumen (5 pasar)	barang pokok dan penting di tingkat konsumen (5 pasar) dengan pemanfaatan sistem informasi harga pangan (SIGAPAN)										
Jaminan mutu dan keamanan pangan di masyarakat masih rendah;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	95.86	Persen	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten	Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten	Kali	-	1	1	1	3	11.590.000	Pengawasan	DKUKMPP	DKUKMPP
Jaminan mutu dan keamanan pangan di masyarakat masih rendah;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	95.87	Persen	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah pelaksanaan pemantauan pasokan dan harga pangan di pasar tradisional (17 kapanewon)	Kali	102	102	102	102	408	37.117.000	Pengawasan	DKPP	DKPP
Jaminan mutu dan keamanan pangan di	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan	Skor Pola Pangan Harapan	95.88	Persen	Tersedianya data/informasi proyeksi neraca	Jumlah data/informasi proyeksi	Dokumen	1				1	9.222.200	Pengawasan	DKPP	DKPP

Permasalahan	Sasaran Permasalahan	Indikator Permasalahan	Target	Satuan Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
						Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
masyarakat masih rendah;	pangan hasil pertanian				pangan	neraca pangar										
Jaminan mutu dan keamanan pangan di masyarakat masih rendah;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	95.89	Persen	Pembinaan dan Penguatan Koperasi	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha			40		40	2.550.000	Pengawasan	DKUKMPP	DKUKMPP
Jaminan mutu dan keamanan pangan di masyarakat masih rendah;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	95.91	Persen	Pengambilan sampel PSAT	Jumlah pengambilan sampel PSAT	Kali	33				33	10.000.000	Pengawasan	DKPP	DKPP
Jaminan mutu dan keamanan pangan di masyarakat masih rendah;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	95.92	Persen	Pelaksanaan uji pangan asal hewan	Jumlah pangan asal hewan yang diuji yang memenuhi syarat keamanan pangan	Sampel		4			4	2.161.300	Pengawasan	DKPP	DKPP
Jaminan mutu dan keamanan	Meningkatnya produktivitas dan	Skor Pola Pangan	95.93	Persen	Pelaksanaan uji pakan	Jumlah pengambilan sampel	Sampel	4	4	4		12	5.160.500	Pengawasan	DKPP	DKPP

Permasalahan	Sasaran Permasalahan	Indikator Permasalahan	Target	Satuan Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
						Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
pangan di masyarakat masih rendah;	ketersediaan pangan hasil pertanian	Harapan			ternak	pakan ternak										
Jaminan mutu dan keamanan pangan di masyarakat masih rendah;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	95.94	Persen	Penguatan kapasitas pengawasan bagi lembaga pengawasan mutu hasil perikanan dalam rangka keamanan pangan asal ikan	Jumlah dokumen penguatan kapasitas pengawasan bagi lembaga pengawasan mutu hasil perikanan dalam rangka keamanan pangan asal ikan	Dokumen	1				1	-	Pengawasan	DKP	DKP
Jaminan mutu dan keamanan pangan di masyarakat masih rendah;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	95.95	Persen	Penerima manfaat Boga Sehat, menu ramah lansia	Jumlah penerima manfaat Boga Sehat, menu ramah lansia	orang selama 10 bulan	1.112	1.113	1.114	1.115	1..116		Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial	Dinas Sosial
Jaminan mutu dan keamanan pangan di masyarakat masih rendah;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	95.96	Persen	Pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah (beras)	Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah (beras)	Ton		6,5			6,5	99,999.800	Perencanaan dan Penganggaran	DKPP	DKPP
Jaminan mutu dan keamanan pangan di	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan	Skor Pola Pangan Harapan	95.97	Persen	Pelaksanaan pendampingan kelompok lumbung	Jumlah pelaksanaan pendampingan kelompok	Kali	1	1	1	1	4	7.980.000	Sumber Daya Manusia	DKPP	DKPP

Permasalahan	Sasaran Permasalahan	Indikator Permasalahan	Target	Satuan Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
						Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
masyarakat masih rendah;	pangan hasil pertanian				pangan masyarakat	lumbung pangan masyarakat										
Jaminan mutu dan keamanan pangan di masyarakat masih rendah;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	95.98	Persen	Pendampingan dan pembinaan desa mandiri pangan	Jumlah desa mandiri pangan yang mendapatkan pendampingan pembinaan	Jumlah Desa	-	-	6	4	10	9.500.000	Pengawasan	DKPP	DKPP
Jaminan mutu dan keamanan pangan di masyarakat masih rendah;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	95.101	Persen	Jumlah anak yang mendapatkan PMTA	Jumlah anak yang mendapatkan PMTA	Anak	-	-	20	-	20	45.000.000	Lain-lain	DKPP	DKPP
Jaminan mutu dan keamanan pangan di masyarakat masih rendah;	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	95.102	Persen	Pemutakhiran Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen	-	-	-	2	2	9.380.000	Perencanaan dan Penganggaran	DKPP	DKPP
Jaminan mutu dan keamanan pangan di masyarakat masih	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Skor Pola Pangan Harapan	95.103	Persen	Fasilitasi pengajuan sertifikasi halal pada IKM	Jumlah fasilitasi pengajuan sertifikasi halal pada IKM	IKM				32	32	200.000.000	Proses Bisnis dan SOP	DKUKMPP	DKUKMPP

Permasalahan	Sasaran Permasalahan	Indikator Permasalahan	Target	Satuan Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
						Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
rendah;																
Masih rendahnya produktifitas hasil pertanian	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)	0.60	Persen	Pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi tersier	Jumlah rehabilitasi jaringan irigasi tersier	Unit	-	1	-	-	1	89.000.000	Lain-lain	DKPP	DKPP
Masih rendahnya produktifitas hasil pertanian	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)	0.61	Persen	Pengadaan pestisida	Jumlah pestisida	Paket	-	19	-	-	19	9.500.000	Lain-lain	DKPP	DKPP
Masih rendahnya produktifitas hasil pertanian	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)	0.62	Persen	Pengadaan pupuk	Jumlah pupuk	Kg	1.330	-	-	-	1.330	20.825.000	Lain-lain	DKPP	DKPP
Masih rendahnya produktifitas hasil pertanian	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)	0.63	Persen	Pengadaan alat mesin pertanian	Jumlah alat mesin pertanian	Unit	-	8	-	-	8	290.510.000	Teknologi dan Informasi	DKPP	DKPP
Masih rendahnya produktifitas hasil pertanian	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)	0.64	Persen	Pelaksanaan gerakan pengendalian OPT	Jumlah pelaksanaan gerakan pengendalian OPT	Kali	4	18	18	10	50	43.750.000	Teknologi dan Informasi	DKPP	DKPP
Masih rendahnya produktifitas hasil	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas	0.65	Persen	peningkatan Produksi benih bersertifikat	Jumlah produksi benih bersertifikat	Ton	10	20	10	10	50	826.374.800	Lain-lain	DKPP	DKPP

Permasalahan	Sasaran Permasalahan	Indikator Permasalahan	Target	Satuan Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
						Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
pertanian	pertanian	utama) (%)														
Masih rendahnya produktifitas hasil pertanian	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)	0.66	Persen	Peningkatan Produksi bibit ternak	Jumlah produksi bibit ternak	Ekor	2.860	5.005	5.005	2.130	15.000	105.681.920	Lain-lain	DKPP	DKPP
Masih rendahnya produktifitas hasil pertanian	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)	0.67	Persen	peningkatan Produksi benih ikan	Jumlah produksi benih ikan	Ekor	1.548.750	1.076.250	1.076.250	1.548.750	5.250.000	368.165.320	Lain-lain	DKP	DKP
Masih rendahnya produktifitas hasil pertanian	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)	0.68	Persen	Pelaksanaan pelatihan pembibitan tanaman buah-buahan	Jumlah pelatihan pembibitan tanaman buah-buahan	Kelompok	-	7	7	-	14	120.679.300	Sumber Daya Manusia	DKPP	DKPP
Masih rendahnya produktifitas hasil pertanian	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)	0.69	Persen	Pelaksanaan sosialisasi pengenalan pertanian di sekolah	Jumlah sosialisasi pengenalan pertanian di sekolah	Lokasi	-	32	-	-	32	70.400.000	Sumber Daya Manusia	DKPP	DKPP
Masih rendahnya produktifitas hasil pertanian	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)	0.70	Persen	Pelaksanaan pelatihan budidaya tanaman buah-buahan	Jumlah pelatihan budidaya tanaman buah-buahan	Lokasi	-	-	2	-	2	39.302.000	Sumber Daya Manusia	DKPP	DKPP
Masih rendahnya produktifitas hasil	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas	0.71	Persen	Pelaksanaan pelatihan budidaya tanaman	Jumlah pelaksanaan pelatihan budidaya tanaman	Lokasi	-	-	2	-	2	41.015.000	Sumber Daya Manusia	DKPP	DKPP

Permasalahan	Sasaran Permasalahan	Indikator Permasalahan	Target	Satuan Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
						Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
pertanian	pertanian	utama) (%)			hidroponik	hidroponik										
Masih rendahnya produktifitas hasil pertanian	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)	0.72	Persen	Pelaksanaan kegiatan gerakan tanam/panen	Pelaksanaan kegiatan gerakan tanam/panen	Kali	-	2	4	2	8	41.243.000	Sumber Daya Manusia	DKPP	DKPP
Masih rendahnya produktifitas hasil pertanian	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)	0.73	Persen	Pelaksanaan pelatihan SOP KEP	Jumlah pelatihan SOP KEP	Kali	-	1	-	-	1	13.714.700	Sumber Daya Manusia	DKPP	DKPP
Masih rendahnya produktifitas hasil pertanian	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)	0.74	Persen	Pelaksanaan pelatihan pascapanen, pengolahan hasil dan pemasaran	Pelatihan pascapanen pengolahan hasil dan pemasaran pertanian	Kelompok	-	1	-	-	1	12.011.500	Sumber Daya Manusia	DKPP	DKPP
Masih rendahnya produktifitas hasil pertanian	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)	0.75	Persen	Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah layanan	Layanan	0,25	0,25			1	199.330.000	Lain-lain	DKP	DKP
Masih rendahnya produktifitas hasil pertanian	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)	0.76	Persen	Layanan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya	Jumlah Belanja Jasa Tenaga Ahli Hama dan Penyakit Ikan	Orang / Bulan	3	6	6	5	20	70.000.000	Lain-lain	DKP	DKP
Masih rendahnya produktifitas hasil	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan	Pertumbuhan produksi sektor pertanian	0.77	Persen	Pelatihan pascapanen perikanan	Jumlah pelatihan pascapanen	Kali			4		4	42.517.000	Sumber Daya Manusia	DKP	DKP

Permasalahan	Sasaran Permasalahan	Indikator Permasalahan	Target	Satuan Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
						Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
pertanian	pangan hasil pertanian	(komoditas utama) (%)				perikanan										
Masih rendahnya produktifitas hasil pertanian	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)	0.78	Persen	Pelaksanaan bazar perikanan	Jumlah bazar perikanan	Kali				1	1	5.900.000	Sumber Daya Manusia	DKP	DKP
Masih rendahnya produktifitas hasil pertanian	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)	0.79	Persen	Pelayanan kesehatan hewan	Jumlah pelayanan kesehatan hewan	Ekor	4570	5578			10.148	204.786.300	Lain-lain	DKPP	DKPP
Masih rendahnya produktifitas hasil pertanian	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)	0.80	Persen	Fasilitasi sarana usaha perikanan	Jumlah fasilitasi sarana usaha perikanan	Kali		8			8	170.571.600	Sumber Daya Manusia	DKP	DKP
Masih rendahnya produktifitas hasil pertanian	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)	0.81	Persen	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Frekuensi Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sarana Perikanan Tangkap	Unit		3			3	1.400.000	Lain-lain	DKP	DKP
Masih rendahnya produktifitas hasil pertanian	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)	0.82	Persen	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan	Kelompok		1			1	1.400.000	Lain-lain	DKP	DKP

Permasalahan	Sasaran Permasalahan	Indikator Permasalahan	Target	Satuan Target	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
						Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
						Kelembagaannya										
Masih rendahnya produktifitas hasil pertanian	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan hasil pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian (komoditas utama) (%)	0.83	Persen	Diversifikasi Usaha Nelayan - Demplot Budidaya Air Payau	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	5	5			10	31.925.000	Lain-lain	DKP	DKP

Tabel 6. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Mendorong Peningkatan Mutu dan Akses Layanan Kesehatan

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan

Indikator : Net Death Rate (NDR)

Target :17,9 / 1000 penduduk

Sasaran : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat

Indikator : Persentase PHBS pada tatanan Rumah Tangga

Target : 52,19 persen

Permasalahan	Sasaran Permasalahan	Indikator Permasalahan	Target	Satuan	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
						Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
Keterlambatan dalam merujuk pasien ke rumah sakit	Tersedianya informasi yang cukup tentang alur dan kriteria rujukan ke rs	Jumlah jejaring rs yang mengikuti kegiatan edukasi	18	Faske s	Edukasi dan penguatan jejaring rujukan	Pelaksanaan edukasi	Kali	1	1	1	1	4	3.000.000	SDM	Dinkes	RSSA
Keterlambatan dalam merujuk pasien ke rumah sakit	Tersedianya sistem informasi rujukan dengan jejaring	Cakupan sistem rujukan	1	Sistem	Intergrasi sistem informasi rujukan dengan jejaring rs	Bridging sistem informasi rujukan	Sistem	2	2	2		6	100.000.000	Teknologi Informasi	Dinkes	RSSA
Belum optimalnya bank darah di rumah sakit	Tersedianya bank darah yang sesuai standar kuantitas dan kualitas	Jumlah bank darah yang tersedia	1	Unit	Pembuatan bank darah di rs	Tersedianya bank darah sesuai standar kuantitas dan kualitas	Unit				1	1	100.000.000	Fasilitas	Dinkes	RSSA

Permasalahan	Sasaran Permasalahan	Indikator Permasalahan	Target	Satuan	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
						Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
Belum merata kompetensi SDM Kesehatan	Tersedianya SDM tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan kompetensi penanganan kegawatdaruratan	jumlah SDM tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan kompetensi penanganan kegawatdaruratan	64	orang	Melatih setiap pegawai yang menangani kasus kegawatdaruratan sesuai standar	Sertifikasi SDM dalam penanganan kegawatdaruratan	Orang				64	64	118.200.000	SDM	Dinkes	RSSA
kualitas layanan fasilitas kesehatan perlu ditingkatkan	meningkatkan kualitas layanan fasilitas kesehatan BLUD	Standart Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	84,5	%	Melakukan peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	40	40	40	40	40	194.556.479.306	Sumber Daya Manusia	Dinkes	RSUD PS
		Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan BLUD	81	%	Meningkatkan fasilitas layanan kesehatan BLUD	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	unit			22		22	656.556.000	Sumber Daya Manusia	Dinkes	RSUD PS
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang	paket		1			1	10.000.000	Sumber Daya Manusia	Dinkes	RSUD PS

Permasalahan	Sasaran Permasalahan	Indikator Permasalahan	Target	Satuan	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
						Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
						disediakan										
akses rujukan masih terkendala (kepatuhan rambu lalu lintas)	Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat/pengguna jalan untuk memberikan prioritas jalan kepada ambulans rujukan.	pengguna jalan yang memberikan jalan saat ambulans rujukan melintas di area target sosialisasi	150	orang	Pelaksanaan kampanye edukasi dan sosialisasi mengenai prioritas kendaraan darurat (ambulans) berdasarkan undang-undang lalu lintas.	Jumlah kegiatan sosialisasi prioritas ambulans rujukan yang terlaksana.	pengguna jalan	50	100			150	. 7.950.000	Sumber Daya Manusia	Dinkes	Dishub
Capaian Penemuan Kasus Tuberkulosis masih dibawah target nasional	peningkatan penemuan kasus TB	Cakupan penemuan kasus TB	60	persen	Peningkatan Kapasitas Petugas dalam penanggulangan TBC	Jumlah petugas yang terlatih Program Penanggulangan TBC	petugas			108			30.075.000	Sumber Daya Manusia	Dinkes	Dinkes
Capain kehadiran cek kesehatan gratis mash di bawah target nasional	Peningkatan kehadiran cek kesehatan gratis	Cakupan cek kesehatan gratis	46	persen	Peningkatan kehadiran melalui akselerasi CKG event/ komunitas	Jumlah peserta cek kesehatan gratis	Masyarakat	10	20	30	46	46	61425000	Sumber Daya Manusia	Dinkes	Dinkes
Capaian Penemuan Kasus Tuberkulosis masih dibawah target	peningkatan penemuan kasus TB	Cakupan penemuan kasus TB	60	persen	pemberian PMT TBC	Terlaksananya pemberian PMT pada pasien TB	box	700	700	700	700	700	111.300.000	Lain-Lain	Dinkes	Dinkes

Permasalahan	Sasaran Permasalahan	Indikator Permasalahan	Target	Satuan	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
						Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
nasional																
					Penguatan metode skrining TBC	Terlaksananya skrining TB (ACF) pada orang berisiko TB	orang		500	1500	1000	3000	471.000.000	Lain-Lain	Dinkes	Dinkes
					Pemenuhan dan pengelolaan logistik TBC berbasis aplikasi	Tersedianya Cartridge TCM	test	-	-	6500	-	6500	1.724.159.670	Lain-Lain	Dinkes	Dinkes
Belum tersedianya ruang perawatan PICU/NICU sesuai standar	Tersedianya ruang perawatan PICU/NICU sesuai standar	Jumlah alat bantu nafas untuk neonatal yang tersedia	2	Unit	Menyediakan alat bantu nafas untuk neonatal	Tersedianya alat bantu nafas sebanyak 1 unit	Unit				2	2	200.000.000	Fasilitas	Dinkes	RSSA
Belum merata kompetensi SDM Kesehatan	Tersedianya SDM Perawat dengan kompetensi intensif care sesuai dengan jumlah TT PICU/NICU/ICU	Jumlah SDM perawat dengan kompetensi intensif care sesuai dengan jumlah TT PICU/NICU/ICU	5	Orang	Menyediakan SDM perawat dengan kompetensi intensif care sesuai dengan jumlah TT PICU/NICU/ICU	Tersedianya SDM Perawat dengan kompetensi PICU/NICU/ICU	Orang	1	1	2	1	5	118.200.000	SDM	Dinkes	RSSA
Tingginya angka pe non aktifan kepesertaan JKN dari pusat, Tingginya	Meningkatkan cakupan kepesertaan masyarakat Bantul dalam program jaminan kesehatan agar	Persentase penduduk Bantul yang belum terdaftar sebagai peserta JKN	1,42	persen	Mengoptimalkan perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan	Persentase peningkatan kepesertaan JKN di Kabupaten Bantul	Persen	98,57	98,57	98,57	98,57	98,57	61.396.557.600	perencanaan dan penganggaran	Dinkes	Dinsos

Permasalahan	Sasaran Permasalahan	Indikator Permasalahan	Target	Satuan	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
						Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
angka tunggakan iuran pada kelompok PBPB /mandiri menyebabkan status kepesertaan non aktif	seluruh penduduk terlindungi dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)															
masih tingginya anggota rumah tangga merokok dalam rumah	Belum terlaksananya indikator PHBS RT khususnya merokok diluar rumah	Capaian indikator PHBS RT terkait tidak merokok di dalam rumah	47,81	persen	Menggiatkan lagi kampanye bahaya rokok dan menggiatkan monev ektr melalui dashboard	Jumlah rumah tangga yg ber PHBS terkait tidak merokok di dalam rumah	rumah tangga				150000	150000	2.100.000	Sumber Daya Manusia	Dinkes	Dinkes
masih ada keluarga rawan kesehatan atau berisiko	Terbantunya kebutuhan pangan dasar bagi KK yang teridentifikasi rawan dan berisiko mengalami masalah kesehatan.	Jumlah Rumahtangga /KK berisiko masalah kesehatan yang membutuhkan intervensi bantuan pangan	6	KK/ Rumah Tangga	Melaksanakan kunjungan rumah (home visit) ke 6 KK berisiko masalah kesehatan untuk memantau kondisi kesehatan sekaligus menyalurkan bantuan paket sembako senilai 250.000,- per KK dengan total anggaran 1.500.000,-.	Jumlah rumah tangga berisiko masalah kesehatan yang bisa dibantu	KK/Rumah Tangga	250.000	250.000	500.000	500.000	1.500.000	1.500.000	Sumber Daya Manusia	Dinkes	DPMK

Permasala han	Sasaran Permasalahan	Indikator Permasalahan	Target	Satua n	Rencana Aksi	Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordina tor	Pelaksa na
						Indikator	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total				
kurangnya ketersediaan kualitas air minum	kurangnya pemeliharaan sarana air minum	Capaian kualitas air minum MS	66	persen	Bimtek AM bagi pengelola sarana air minum komunal	Meningkatny a jumlah Rumah tangga yang mempunyai kultas air minum aman	persen	0		66		66	161.080.000		Dinkes	DPUPKP Dinkes

Tabel 7. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan

Sasaran : Meningkatkan akses, kualitas dan mutu pendidikan

Indikator : Angka Harapan Lama Sekolah

Target : 15,92 Tahun

Permasalahan	Sasaran Permasalahan	Indikator Permasalahan	Target	Satuan Target	Output			Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
					Rencana Aksi	Indikator	Satuan	TW1	TW2	TW3	TW4	Total				
Hasil Asesmen Nasional turun karena kualitas pembelajaran kurang optimal sehingga hasil literasi menurun	Meningkatnya kualitas pembelajaran sehingga capaian literasi meningkat	Capaian kompetensi literasi membaca pada rapor pendidikan	80,95	persen	pelatihan literasi untuk pendidik;	jumlah peserta pelatihan literasi	Orang	-	94	161	-	255	48.338.000	Sumber Daya Manusia	Disdikpora	Disdikpora, Dinas Perpustakaan dan Arsip
Hasil Asesmen Nasional turun karena kualitas pembelajaran kurang optimal sehingga hasil literasi menurun	Meningkatnya kualitas pembelajaran sehingga capaian literasi meningkat	Capaian kompetensi literasi membaca pada rapor pendidikan	80,95	persen	Lomba meningkatkan capaian literasi peserta didik;	Jumlah lomba literasi yang diselenggarakan	Kegiatan	-	-	2	-	2	20.000.000	Sumber Daya Manusia	Disdikpora	Disdikpora, Dinas Perpustakaan dan Arsip
Hasil Asesmen Nasional turun karena kualitas pembelajaran kurang optimal sehingga hasil literasi menurun	Meningkatnya kualitas pembelajaran sehingga capaian literasi meningkat	Capaian kompetensi literasi membaca pada rapor pendidikan	80,95	persen	Penyediaan layanan perpustakaan daerah	Jumlah pengunjung	Orang	13.750	13.750	13.750	13.750	55.000	10.000.000	Lain-lain	Disperpusip	Disperpusip
Hasil Asesmen Nasional turun karena kualitas pembelajaran kurang optimal sehingga hasil literasi menurun	Meningkatnya kualitas pembelajaran sehingga capaian literasi meningkat	Capaian kompetensi literasi membaca pada rapor pendidikan	80,95	persen	Penyediaan layanan perpustakaan daerah	Jumlah koleksi buku	Judul	-		-	1.000	1.000	10.000.000	Lain-lain	Disperpusip	Disperpusip

Permasalahan	Sasaran Permasalahan	Indikator Permasalahan	Target	Satuan Target		Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
					Rencana Aksi	Indikator	Satuan	TW1	TW2	TW3	TW4	Total				
Hasil Asesmen Nasional turun karena kualitas pembelajaran kurang optimal sehingga hasil literasi menurun	Meningkatnya kualitas pembelajaran sehingga capaian literasi meningkat	Capaian kompetensi literasi membaca pada rapor pendidikan	80,95	persen	Pendampingan akreditasi peustakaan sekolah	Jumlah peustakaan sekolah yang didampingi	Perpustakaan sekolah	-	-	3	4	7	3.000.000	Lain-lain	Disperpusip	Disperpusip
Hasil Asesmen Nasional turun karena kualitas pembelajaran kurang optimal sehingga hasil literasi menurun	Meningkatnya kualitas pembelajaran sehingga capaian literasi meningkat	Capaian kompetensi literasi membaca pada rapor pendidikan	80,95	persen	Penyelenggaraan layanan peustakaan keliling	Jumlah lokasi layanan	Lokasi	-		2		2	1.000.000	Sumber Daya Manusia	Disperpusip	Disperpusip
Hasil Asesmen Nasional turun karena kualitas pembelajaran kurang optimal sehingga hasil numerasi menurun	Meningkatnya kualitas pembelajaran sehingga capaian numerasi meningkat	Capaian kompetensi numerasi pada rapor pendidikan	80,95	persen	Pelatihan numerasi untuk pendidik;	Jumlah peserta pelatihan numerasi	Orang	-	224	-	-	224	24.514.000	Sumber Daya Manusia	Disdikpora	Disdikpora
Hasil Asesmen Nasional turun karena kualitas pembelajaran kurang optimal sehingga hasil numerasi menurun	Meningkatnya kualitas pembelajaran sehingga capaian numerasi meningkat	Capaian kompetensi numerasi pada rapor pendidikan	80,95	persen	Lomba untuk meningkatkan numerasi peserta didik;	Jumlah lomba numerasi yang diselenggarakan	Kegiatan	-	-	2	-	2	3.000.000	Sumber Daya Manusia	Disdikpora	Disdikpora
Masih kurangnya kompetensi pendidik	Meningkatnya kompetensi pendidik	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	92	persen	pelatihan peningkatan kompetensi pendidik	Jumlah peserta pelatihan peningkatan kompetensi pendidik	orang		102	276	365	743	95.455.000	Perencanaan dan Penganggaran	Disdikpora	Disdikpora

Permasalahan	Sasaran Permasalahan	Indikator Permasalahan	Target	Satuan Target		Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
					Rencana Aksi	Indikator	Satuan	TW1	TW2	TW3	TW4	Total				
Masih kurangnya kompetensi pendidik	Meningkatnya kompetensi pendidik	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	92	persen	Melakukan penilaian kompetensi bagi pendidik	Jumlah ASN pendidik yang di nilai kompetensinya	orang	94	222	951	-	1.267	44.345.000	Sumber Daya Manusia	BKPSDM	BKPSDM
Masih kurangnya kompetensi pendidik	Meningkatnya kompetensi pendidik	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	92	persen	Melakukan penilaian kompetensi bagi pendidik	Jumlah ASN yang di rekomendasikan untuk pemenuhan kompetensi	orang	94	222	951	-	1.267	3.000.000	Sumber Daya Manusia	BKPSDM	BKPSDM
Masih kurangnya sa ras layanan pendidikan	Peningkatan kualitas sa ras pendidikan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang layak	80	persen	pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan	Jumlah sekolah dengan peningkatan sa ras	Sekolah	3	10	44	-	57	20.589.894.752	Perencanaan dan Penganggaran	Disdikpora	Disdikpora, DPUPKP, BPBJ
Masih kurangnya sa ras layanan pendidikan	Peningkatan kualitas sa ras pendidikan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang layak	80	persen	Penyelenggaraa n Angkutan gratis untuk siswa sekolah	Jumlah operasional bus sekolah pada hari sekolah	kali/hari	2	2	2	2	2	70.800.000	Inovasi	Dinas perhubungan	Dinas Perhubungan
Pelayanan terhadap kelompok rentan belum maksimal	Intervensi Kkhusus Untuk Kelompok Rentan	Prosentase Kompetensi guru inklusi	10	persen	Melaksanakan pelatihan pendidikan inklusi untuk guru	Jumlah peserta pelatihan pendidikan inklusi	orang	-	219	-	-	219	41.085.000	Sumber Daya Manusia	Disdikpora	Disdikpora
Pelayanan terhadap kelompok rentan belum maksimal	Intervensi Kkhusus Untuk Kelompok Rentan	Cakupan sa ras Inklusi	4	satuan pendidik-an	Menyediakan sa ras pendukung inklusi	Jumlah satuan pendidikan yang menyediakan sa ras pendukung inklusi	satuan pendidik-an	-	-	4	-	4	20.000.000	Pengawasan	Disdikpora	Disdikpora

Permasalahan	Sasaran Permasalahan	Indikator Permasalahan	Target	Satuan Target		Output		Target					Anggaran	Fokus Intervensi	Koordinator	Pelaksana
					Rencana Aksi	Indikator	Satuan	TW1	TW2	TW3	TW4	Total				
Pendidikan karakter/Pendidikan khas kejojjakartaan belum tertuang dalam kurikulum pendidikan dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan karakter pada jenjang pendidikan dasar	Prosentase satuan pendidikan yang mendapatkan pelatihan pendidikan karakter	100	persen	Melaksanakan pelatihan penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan	Jumlah pelatihan pendidikan karakter	kali kegiatan	-	-	-	4	4	40.000.000	Sumber Daya Manusia	Disdikpora	Disdikpora
Komunitas Belajar (Kombel) belum optimall menggunakan data hasil asesment untuk menentukan fokus perbaikan pembelajaran	Bimtek pemanfaatan Rapor Pendidikan, asesment, dan data pembelajaran	Prosentase Kombel yang mendapatkan pelatihan	100	persen	Bimtek Kombel	Terlaksananya bimtek pengutana Kombel	kali kegiatan	-	-	3	-	3	20.000.000	Sumber Daya Manusia	Disdikpora	Disdikppora
Masih tinggi angka putus sekolah dari keluarga kurang mampu	Menurunnya angka putus sekolah	angka putus sekolah	0,04	persen	Seleksi calon peserta sekolah rakyat	jumlah calon siswa sekolah rakyat	orang	-	-	144	-	144	1.000.000	Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial	Dinas Sosial

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH